

# **PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENCEGAHAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN BULELENG**

**Oleh**

**I Gusti Ketut Riski Suputra, NIM 1814101113**

**Program Studi Ilmu Hukum**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai peran Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dalam pencegahan sengketa dan konflik pertanahan di Kabupaten Buleleng, serta mengetahui dan menganalisa mengenai faktor-faktor penyebab tingginya kasus sengketa tanah di Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Adapun data dan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *non probability sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik *purposive sampling*. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dalam pencegahan sengketa dan konflik pertanahan di Kabupaten Buleleng adalah melalui beberapa program kerja/rencana kerja tahunan yang rutin dijalankan serta strategi pencegahan yang berupa penguatan kerja sama dan koordinasi dengan Instansi Pemerintah, Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, APH, dan stakeholder lainnya yang terkait serta masyarakat umum. Optimalisasi sistem informasi teknologi elektronik sengketa, konflik dan perkara pertanahan untuk perencanaan, analisa kebijakan, penanganan serta pencegahan kasus pertanahan, melakukan pemetaan potensi kasus berdasarkan tipologi kasus dan dilakukan kajian ilmiah/akademis maupun kajian praktis terhadap penyebab terjadinya kasus/akar masalah serta strategi penyelesaiannya maupun pencegahan kasus baru. Sedangkan faktor-faktor penyebab tingginya kasus sengketa tanah di Kabupaten Buleleng yaitu belum efektifnya koordinasi dan kerja sama antara Kementerian/Lembaga dan pihak terkait dalam rangka penanganan penyelesaian dan pencegahan kasus pertanahan; belum adanya mekanisme upaya pencegahan yang tepat dan efektif mengenai kasus pertanahan dalam rangka menekan angka pertambahan kasus pertanahan di wilayah Kabupaten Buleleng; serta terbatasnya kewenangan institusi yang bersinggungan dengan kewenangan instansi lain. Selain itu beberapa faktor lain dari masyarakat juga dapat mempengaruhi persentase terjadinya kasus pertanahan di Kabupaten Buleleng.

Kata Kunci: pertanahan, sengketa, faktor penyebab, peran kantor pertanahan.

**THE ROLE OF THE LAND OFFICE IN PREVENTING LAND DISPUTES  
AND CONFLICTS IN BULELENG DISTRICT**

**By**

**I Gusti Ketut Riski Suputra, NIM 1814101113**

**Law Department**

**ABSTRACT**

*This research aims to find out and analyze the role of the Buleleng Regency Land Office in preventing land disputes and conflicts in Buleleng Regency, as well as knowing and analyzing the factors that cause the high number of land dispute cases in Buleleng Regency. In this research, the type of research used is empirical legal research using descriptive research characteristics. The data and data sources used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection techniques used are document study techniques, observation techniques and interview techniques. The sampling technique used was a non-probability sampling technique and the subject determination used a purposive sampling technique. Next, the data obtained is processed and analyzed qualitatively. The research results show that the role of the Buleleng Regency Land Office in preventing land disputes and conflicts in Buleleng Regency is through several work programs/annual work plans that are routinely carried out as well as prevention strategies in the form of strengthening cooperation and coordination with Government Agencies, Ministries/Institutions, Universities, APH, and other related stakeholders as well as the general public. Optimizing electronic technology information systems for land disputes, conflicts and cases for planning, policy analysis, handling and preventing land cases, mapping potential cases based on case typology and carrying out scientific/academic and practical studies on the causes of cases/root problems as well as resolution strategies and prevention of new cases. Meanwhile, the factors causing the high number of land dispute cases in Buleleng Regency are the ineffective coordination and cooperation between Ministries/Institutions and related parties in the context of handling the resolution and prevention of land cases; there is no appropriate and effective prevention mechanism regarding land cases in order to reduce the increase in land cases in the Buleleng Regency area; as well as the limited authority of institutions that intersect with the authority of other agencies. Apart from that, several other factors in society can also influence the percentage of land cases occurring in Buleleng Regency.*

*Keywords: land, disputes, causal factors, role of the land office.*